ANALISIS TINGKAT KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE*: PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2015-2019

Kurnia Imanuella¹

Theresia Woro Damayanti²

^{1,2}Universitas Kristen Satya Wacana, Jalan Diponegoro No 52-60,
Salatiga

Surel: theresia.damayanti@uksw.edu

Abstrak. Analisis Tingkat Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*: Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2015-2019. Pendapatan negara terbesar bersumber dari penerimaan pajak, akan tetapi seringkali penerimaan pajak belum diterima dengan maksimal, salah satunya karena adanya *tax avoidance*. Ada beberapa alasan perusahaan melakukan *tax avoidance*, diduga karena adanya koneksi politik dalam perusahaan menjadi salah satu penyebabnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat koneksi politik terhadap *tax avoidance* menggunakan dua metode pengukuran yang berbeda. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI tahun 2015-2019. Data sampel yang memenuhi kriteria sejumlah 376 laporan keuangan, diolah menggunakan uji regresi data panel menggunakan *evIEWS*. Penelitian menunjukkan jika koneksi politik diukur menggunakan skor tingkat koneksi politik maka hasil menyatakan bahwa tingkat koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan jika koneksi politik diukur menggunakan variabel *dummy* hasil menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Tax Avoidance*, Tingkat Koneksi Politik

Abstract. Political Connection Level Analysis on Tax Avoidance: Manufacturing Company in BEI 2015-2019. Taking into consideration that the highest national income source came from the tax revenue but cannot be neglected, that tax avoidance is one of the determining factors why its operation has not been performed well. Political connections presumed to be one driver of the tax avoidance popularity. This study aimed to investigate the effect of corporate political connection towards tax avoidance using two different measurement methods. The analysis has used secondary data of manufacturing companies financial statements listed in Indonesia Stock Exchange over the period of 2015-2019. 376 qualified financial statements were processed by using panel data regression analysis through *evIEWS*. Study shows if political connections measured through political connection

value score it affected the tax avoidance, meanwhile if it measured through dummy variable it shows political connections has nothing to do with tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Political Connection Level

PENDAHULUAN

Kebutuhan negara tiap tahun akan mengalami peningkatan. Sumber data dari www.kemenkeu.go.id, menjelaskan bahwa anggaran belanja negara tahun 2018 sebesar 2.220,7 T sedangkan tahun 2019 naik menjadi 2.461,1 T. Terdapat berbagai hal yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tercapainya anggaran. Salah satunya adalah melalui pajak, sebagai sumber pendapatan terbesar untuk negara. Tahun 2018, pajak menyumbang sebesar 1.618,1 T dari total pendapatan negara 1.894,7 T. Sedangkan pada tahun 2019, pajak menyumbang sebesar 1.786,4 T dari total pendapatan negara 2.165,1 T. Berdasar data yang didapat dari www.pajak.go.id, presentase realisasi kepatuhan formal wajib pajak pada tahun 2012 sebesar 52,30%, 2013 sebesar 56,15%, dan 2014 sebesar 58,90%. Presentase kepatuhan formal masih belum maksimal, yang menyebabkan anggaran pendapatan negara belum terpenuhi seutuhnya, karena itu, perlu untuk diketahui alasan wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut terjadi, dimungkinkan karena wajib pajak berupa perusahaan melakukan penghindaran pajak, baik secara

legal (*tax avoidance*) atau secara illegal (*tax evasion*) (Hijriani *et al.*, 2017). Seperti yang dilakukan PT Adaro, perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 1,75 T. Dalam kasus tersebut, PT Adaro melakukan *transfer pricing* ke anak perusahaan, hal itu termasuk dalam *tax avoidance*, karena tidak melanggar aturan tetapi tidak etis untuk dilakukan. Keuntungan PT Adaro berasal dari sumber daya di Indonesia tetapi pemasukan pajak negara tidak maksimal (Sugianto, 2019).

Amri (2017) menjelaskan definisi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah contoh skema yang digunakan perusahaan untuk melakukan *tax planning* dengan melakukan penghematan pajak yang dianggap sebagai beban perusahaan. Pada akhirnya perusahaan yang melakukan *tax planning* tersebut dapat meningkatkan pendapatan bersih. Terdapat beberapa cara yang dilakukan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Misalnya seperti menggunakan orang yang berpengaruh di perusahaan untuk memberi keuntungan dari aspek pajaknya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan & Firmansyah (2017), di perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015, perusahaan tersebut menganggap pajak menjadi hal yang menghalangi tujuan perusahaan, sehingga perusahaan berusaha menurunkan nilai pajak dengan menggunakan koneksi politik.

Terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian dengan hasil penelitian yang sudah dibahas sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan Hijriani *et al.* (2017) di Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. Koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan BUMN yang lebih diperhatikan oleh negara, serta pada penelitian beberapa BUMN, perusahaan tersebut sedang diawasi BPK karena mengalami penunggakan dalam membayar pajak. Penelitian ini didukung oleh Sugiyarti (2017) yang melakukan penelitian di perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016, dijelaskan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut terjadi karena semakin kuat hubungan perusahaan dengan dunia politik, semakin rendah perusahaan memanfaatkan hubungan politik untuk melakukan *tax avoidance*. Perusahaan milik negara (BUMN/D) sebagai *principal* dianggap sebagai perusahaan yang patuh akan peraturan dalam hal kewajiban membayar pajak. BUMN/D menunjukkan

kepatuhannya dan tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan *tax avoidance*. Sikap tersebut diteladankan kepada *agent* untuk menjaga nama baik pemerintah dan menjadi contoh untuk masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh akan kewajiban perpajakannya.

Penelitian mengenai faktor penyebab *tax avoidance* terus berkembang dengan variabel yang berbeda-beda, pada penelitian ini menyelidiki pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Seperti dalam penelitian Ferdiawan & Firmansyah (2017), hasil kesimpulannya menunjukkan bahwa koneksi politik mempengaruhi *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut tidak didukung dalam penelitian Hijriani *et al.* (2017) dan Sugiyarti (2017) yang memberi kesimpulan bahwa koneksi politik tidak mempengaruhi *tax avoidance* karena perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan BUMN sebagai *principal* yang dianggap sebagai perusahaan yang patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Adanya perbedaan hasil kesimpulan pada penelitian terdahulu, maka penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*, dengan mempertimbangkan tingkat konektivitas dan tidak hanya jumlah personil yang terhubung (Supatmi *et al.*, 2019). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan terbaru yaitu 2015-2019 di

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Berdasar latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan suatu masalah penelitian, yaitu berpengaruh atau tidaknya tingkat koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi kepada negara, dengan mengetahui penyebab penghindaran pajak (*tax avoidance*), pihak pemerintah terkhusus Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pengendalian secara preventif maupun korektif. Dengan begitu, diharapkan penghindaran pajak dapat diminimalisir dan pendapatan negara akan diterima dengan maksimal. Penelitian ini juga memberikan manfaat untuk pemilik perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI supaya dapat mengontrol manajemen perusahaan dalam melakukan *tax planning*, sehingga nama baik perusahaan tidak dirugikan.

TELAAH LITERATUR

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) menghadapi *gap* antara pengelola perusahaan atau manajemen dengan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Dalam hal ini, pengelola perusahaan disebut *agent*, sedangkan

pihak pemilik perusahaan disebut *principal* (Nurfadilah *et al.*, 2015). Untuk perusahaan berbentuk PT, tanggung jawab *principal* hanya menyetorkan modal. Artinya, saat perusahaan mengalami kebangkrutan sangat mungkin modal dari pemilik saham akan hilang, tetapi harta pribadi dari pemilik saham tidak diikutsertakan dalam kerugian tersebut. Dengan demikian, terdapat kemungkinan yang terjadi dalam masalah keagenan atau disebut *agency problem*.

Hubungan keagenan sebagai suatu perjanjian dimana pihak *principal* memerintah *agent* untuk membuat keputusan terbaik bagi *principal*. *Principal* memberikan tanggung jawab kepada *agent* untuk mengambil keputusan, dimana hak dan kewajiban kedua pihak tertulis dalam satu surat perjanjian. Pihak *agent* diasumsikan tidak hanya menerima keuntungan *financial* tetapi juga seperti keuntungan berupa waktu luang, dan kondisi pekerjaan yang atraktif. Pemegang saham berharap *agent* melakukan tanggungjawabnya sesuai wewenang yang diberikan, tetapi seringkali *agent* melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginan *principal*. Hal ini menyebabkan konflik yang terjadi antara *principal* dengan *agent* (K. Sari & Somoprawiro, 2020).

Koneksi Politik

Koneksi politik adalah suatu hubungan antar suatu pihak dengan individu atau oknum yang memiliki kekuasaan pada bidang politik.

Hubungan tersebut bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang memberi keuntungan antar dua pihak. Keuntungan untuk perusahaan diantaranya yaitu mendapatkan suntikan modal, dan risiko pemeriksaan pajak perusahaan menjadi lebih rendah (Sugiyarti, 2017). Terdapat keuntungan dan manfaat lainnya yang diperoleh perusahaan seperti pengurangan biaya kompetisi, mengurangi kewajiban peraturan, dan mudah membuat proyek dengan pemerintah (K. Sari & Somoprawiro, 2020). Perusahaan disebut terkoneksi politik apabila minimal salah satu dewan komisaris memiliki jabatan atau pernah menjabat sebagai anggota pemerintah negara yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, ataupun lembaga yang diperlukan dalam tatanan negara (Maulana & Wati, 2019). Perusahaan berkoneksi politik dengan cara-cara tertentu, seperti menjalin kedekatan dengan politisi.

Terdapat dua jenis koneksi politik yang ada dalam perusahaan. Koneksi yang pertama adalah pemilik perusahaan menjadi bagian dari anggota suatu partai politik. Koneksi yang kedua adalah koneksi politik yang dibuat secara temporer, yaitu merekrut komisaris yang berasal dari dunia politik, seperti institusi pemerintah (Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Ketika direktur eksekutif maupun *non* eksekutif perusahaan atau pemegang saham merupakan bagian dari pemerintah atau kepala negara, terdapat

kemungkinan perusahaan akan menikmati fasilitas dan kemudahan dalam transaksi perusahaan (Faccio, 2006). Habib *et al.* (2017) menjelaskan bahwa suatu perusahaan terhubung secara politis apabila setidaknya satu pemegang saham besar (orang yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan setidaknya 10% hak suara perusahaan) atau anggota dewan adalah anggota aktif atau mantan anggota parlemen, menteri atau kepala pemerintahan daerah, perwira militer senior, atau orang yang terkait erat dengan politisi atau partai politik.

Tax Avoidance

Pajak adalah kontribusi besar bagi negara, namun disisi lain pajak adalah salah satu objek terbesar yang dapat mengurangi laba perusahaan, termasuk perusahaan yang terdaftar di BEI. Perusahaan yang terdaftar pada BEI tidak hanya perusahaan swasta, namun juga terdapat perusahaan pemerintah. Karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah, memungkinkan timbulnya penghindaran pajak oleh perusahaan (Hijriani *et al.*, 2017). Wajib pajak seringkali berupaya untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya, dengan melakukan pengelolaan pajak atau mengelola bisnis dan keputusan didalamnya untuk mendapatkan keuntungan yang dilihat dari aspek pajaknya, hal itu dapat berujung pada penghindaran pajak (Faradiza, 2019). Dapat diartikan definisi

penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha mengurangi atau menghemat pajak, selama hal tersebut tidak menentang peraturan yang ada (Hidayat, 2018). Sesuai dengan penjelasan Eksandy (2017), *tax avoidance* dilakukan dengan usaha skema transaksi yang tujuannya untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan perundang-undangan dan peraturan yang ada.

Pengembangan Hipotesis **Pengaruh Tingkat Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance**

Koneksi politik pada perusahaan dapat digunakan untuk kegiatan manajemen pajak agresif. Salah satu hal yang berpengaruh dalam hubungan koneksi politik dengan *tax avoidance* adalah kebijakan manajemen dari dalam perusahaan. Sesuai dengan *political power theory*, perusahaan dengan koneksi politik akan menggunakan kedekatan hubungan yang dimiliki untuk mendapat keuntungan, termasuk keuntungan dalam membayar pajak (Hidayati & Diyanty, 2018). Menurut Kim dan L.Zhang dalam Sugiyarti (2017), koneksi politik dapat meningkatkan tingkat pajak agresivitas, karena dengan adanya koneksi politik dapat mengurangi biaya pajak yang tinggi. Menurut *resource dependence theory*, koneksi politik memberikan efek positif bagi perusahaan (Supatmi *et al.*, 2019). Seperti dalam penelitian Ferdiawan & Firmansyah (2017) menyimpulkan bahwa koneksi

politik digunakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* sebagai cara untuk meringankan beban pajak.

Dalam hasil kesimpulan Wahab Abdul *et al.* (2015), yang melakukan penelitian mengenai pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak di perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia tahun 2000 hingga 2009, menjelaskan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara koneksi politik dengan penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar publik dengan individu yang memiliki koneksi politik, sehingga individu tersebut menawarkan untuk memberi bantuan kepada perusahaan. Bantuan tersebut dapat berupa keringanan dalam membayar pajak maupun dana bebas pajak. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Khlif & Amara (2019), yang melakukan penelitian mengenai pengaruh koneksi politik terhadap penggelapan pajak dengan sampel 35 negara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Berdasar uraian diatas, dapat dikembangkan suatu hipotesis yaitu :

H_a : Tingkat koneksi politik berpengaruh terhadap tax avoidance diukur dengan skor tingkat koneksi politik.

H_o : Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tax avoidance diukur dengan variabel dummy.

Gambar 1 Model Penelitian

Sumber: Peneliti, 2021

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rumusan masalah berbentuk asosiatif dengan hubungan kausal karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar dua variabel atau lebih. Hasil penelitian yang menggunakan metode kuantitatif akan memberikan hasil penelitian yang menunjukkan hubungan signifikan antar variabel, sehingga kesimpulan akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti (Sugiyarti, 2017). Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang meliputi laporan keuangan dan informasi mengenai profil dewan direktur eksekutif dan dewan *non* eksekutif perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diakses dari *website* resmi BEI yaitu

www.idx.co.id, serta menggunakan situs lainnya untuk mengkonfirmasi koneksi politik yang ada dalam perusahaan, seperti :

1. Anggota DPR RI yang diakses melalui www.dpr.go.id/anggota
2. Menteri kabinet yang diakses melalui *website* resmi pemerintah
3. *Website* partai politik
4. *Website* resmi terkait lainnya

Populasi dan Sampel

Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Perusahaan manufaktur diambil sebagai populasi karena sektor tersebut tidak dipengaruhi pajak final yang mengakibatkan penyimpangan dalam menghitung pengaruh *tax avoidance* menggunakan proksi. Pengambilan sampel menggunakan

metode *purposive sampling (judgement sampling)* yang merupakan bagian dari metode *non-probability sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria yang telah ditentukan (Ferdiawan & Firmansyah, 2017).

Diantara populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tidak dipilih sebagai sampel penelitian. Pemilihan sampel penelitian menggunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019
2	Tidak memiliki laba komersil negatif
3	Memiliki informasi terkait profil dewan komisaris dan dewan direksi
4	Memiliki data yang lengkap untuk bisa diteliti sehubungan dengan variabel

Sumber: Penulis

Penelitian ini menggunakan data *unbalanced*, dari populasi sejumlah 110 perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun, sehingga total terdapat 550 laporan keuangan yang dijadikan populasi, yang memenuhi syarat untuk sampel penelitian adalah 376 laporan keuangan. Sebanyak 174 laporan keuangan tidak memenuhi syarat karena terdapat data yang tidak lengkap untuk dijadikan sampel penelitian serta data *outlier* juga dikeluarkan sebagai sampel penelitian. Berikut adalah tabel rangkuman pemilihan sampel.

Tabel 2. Pemilihan Sampel

Pemilihan Sampel	
Total Populasi	550 laporan keuangan
Total Sampel (Sebelum <i>Outlier</i>)	384 laporan keuangan
Total <i>Outlier</i>	8 laporan keuangan
Total Sampel Setelah <i>Outlier</i>	376 laporan keuangan

Sumber: Penulis

Variabel dan Pengukuran Variabel

Tingkat Koneksi Politik

Dalam penelitian ini, koneksi politik sebagai variabel *independent*. Skor koneksi politik diukur menggunakan indeks koneksi politik dengan menjumlahkan skor keberadaan koneksi politik berdasar posisi dan status. Dalam menilai keberadaan koneksi politik dalam perusahaan, penelitian ini memodifikasi dari penelitian Tao *et al.* (2017) supaya lebih sesuai dengan konteks Negara Indonesia. Berdasar struktur organisasi kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia, karir atau jabatan dapat dibagi menjadi tujuh tingkatan. Oleh karena itu, dewan dalam perusahaan yang terhubung secara politis akan

diberi skor sesuai dengan posisi yang dipegang di lembaga pemerintah.

Dewan yang terhubung dengan politisi yang masih aktif diberi skor 2 (terendah) hingga 8 (tertinggi), sementara dewan yang terhubung dengan mantan politisi diberi skor 1 (terendah) hingga 7 (tertinggi). Sedangkan, nilai nol diberikan jika perusahaan tidak memiliki koneksi politik (Supatmi *et al.*, 2019). Indeks koneksi politik yang dimiliki perusahaan, akan dihitung dengan logaritma natural total skor koneksi politik pada perusahaan ditambah satu poin. Perhitungan ini didasarkan pada pertimbangan adanya koneksi politik, dan ada juga perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik (Tao *et al.*, 2017).

$$\text{Ln}(PCI) = \text{Ln}(1 + PCI)$$

Tax Avoidance

Variabel *dependent* dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. *Effective tax rate* (ETR) digunakan sebagai alat ukur dalam pengukuran variabel *tax avoidance*. ETR adalah perbandingan beban pajak terhadap laba perusahaan sebelum pajak penghasilan yang dipakai guna membayar beban pajak yang harus dibayar. Beban pajak perusahaan terbagi menjadi dua macam yaitu pajak kini dan pajak tangguhan (Prayogo, 2015). Pengukuran ini digunakan untuk mengukur seberapa tinggi adanya aktivitas penghindaran

pajak, karena ETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan pertimbangan seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase ETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% menandakan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase ETR menandakan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yang secara statistik mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu ukuran perusahaan (*SIZE*) dan rasio *leverage* (*DER*) (Supatmi *et al.*, 2019; Lestari *et al.*, 2019). Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara seperti : total aset, *log size*, penjualan, kapitalisasi pasar dan hal lainnya (N. Sari *et al.*, 2016). Semakin besar perusahaan, maka total aset yang dimiliki perusahaan juga semakin besar. Untuk melakukan *tax planning*, perusahaan dapat menekan beban pajak dengan mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak, yaitu dengan menggunakan beban penyusutan dan amortisasi yang ada dari pembelian aset. (Permata *et al.*, 2018). Ukuran perusahaan yang lebih besar, akan memiliki total sumber daya yang digambarkan dengan aset perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi dalam perusahaan. Semakin tinggi sumber daya yang dimiliki perusahaan, maka semakin tinggi ukuran perusahaan, begitu pula sebaliknya. Ukuran perusahaan diukur seperti berikut :

$$SIZE = \ln(\text{total aset})$$

Rasio *leverage* adalah perbandingan yang digunakan untuk

mengukur seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan dibiayai dengan hutang. *Leverage* juga dapat diartikan sebagai perbandingan beban utang yang ada pada perusahaan terhadap aktiva yang dimiliki. Dalam arti luas, *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan mengalami kebangkrutan (Lestari *et al.*, 2019). Menurut Darmawan & Sukartha (2014), perusahaan besar akan menggunakan sumber daya yang dimiliki daripada menggunakan utang sebagai pembiayaan keperluan perusahaan. Perusahaan besar akan diperhatikan pemerintah, sehingga manajer perusahaan akan cenderung bersikap patuh. Pengukuran variabel ini menggunakan *Debt to Equity Ratio* (*DER*) untuk memproksikan *leverage*. *Debt to Equity Ratio* (*DER*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data *time series* dan *cross sectional* yaitu data yang didapat dan dikumpulkan dari banyak objek dengan runtutan waktu lebih dari satu tahun, sehingga penelitian ini menggunakan metode uji regresi data panel menggunakan *Eviews*. Pengujian

yang dilakukan dalam penelitian ini ada beberapa tahap, yaitu :

1. Statistik Deskriptif

Pengujian yang pertama adalah pengujian statistik deskriptif. Pada pengujian ini akan memberikan gambaran mengenai informasi data yang dimiliki. Pada hasil pengujian, akan ditampilkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan standar deviasi dari data yang ada.

2. Stasioneritas Data

Penelitian ini memakai data *time series* dengan karakteristik nilai relatif yang berubah-ubah sesuai dengan waktu yang berjalan, sehingga diperlukan uji stasioneritasnya (Winarno, 2015). Pengujian stasioneritas data menggunakan uji akar unit (*unit root test*) PP-Fisher Chi-square. Data dikatakan stasioner jika nilai $p < 0,05$.

3. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Untuk memperoleh uji regresi data panel yang tepat, cara yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih model yang lebih tepat antara model *common effect* atau model *fixed effect*. Jika nilai F hitung lebih kecil dari nilai F kritis ($p > 0,05$) maka model regresi data panel yang dapat dilakukan adalah model

common effect sedangkan jika hasil uji chow menunjukkan nilai F hitung lebih besar dari nilai F kritis ($p < 0,05$) maka model yang tepat dilakukan adalah model *fixed effect*.

b. Uji Hausmen

Uji Hausmen dilakukan untuk memilih model yang tepat antara model *fixed effect* atau model *random effect*. Jika nilai statistik hausman lebih kecil dari nilai kritis *chi-squares* ($p > 0,05$) maka model yang tepat dilakukan adalah model *random effect*, namun jika nilai statistik hausman lebih besar dari nilai kritis *chi-squares* ($p < 0,05$) maka model yang tepat dilakukan adalah model *fixed effect*.

c. Uji Langrange Multiplier (LM)

Uji LM digunakan untuk memilih model yang tepat antara model *random effect* atau model *common effect*. Jika hasil nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis *chi-squares* maka model yang dipilih ($p < 0,05$) adalah model *random effect*. Sedangkan, jika nilai LM hitung lebih kecil dari nilai kritis *chi-squares* ($p > 0,05$) maka model yang dipilih adalah model *common effect*.

4. Uji Hipotesis

Setelah diperoleh model penelitian panel yang tepat, maka akan dilakukan

pengujian hipotesis. Model yang akan diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh

koneksi politik terhadap *tax avoidance*, dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1 PC_{it} + \beta_2 SIZE_{it} + \beta_3 DER_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

ETR : *effective tax rate* sebagai proksi dalam penghindaran pajak

PC : Koneksi Politik (*Political Connection*)

SIZE : Ukuran Perusahaan

DER : Leverage

β_1 : Koefisien regresi

e : *Error time*

t : Waktu

i : Menunjukkan perusahaan.

5. Pengujian Tambahan

Di dalam penelitian ini dilakukan pengujian tambahan, yaitu melakukan tes sensitivitas dengan mengubah indeks koneksi politik ke dalam variabel *dummy* yang dimisalkan satu jika perusahaan memiliki

koneksi politik, dan nol jika perusahaan tidak memiliki koneksi politik. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui efek pengukuran atas variabel koneksi politik terhadap hasil penelitian (Supatmi *et al.*, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian

Statistik Deskriptif

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif

	DER	ETR	POL	SIZE
Mean	0.934320	0.290035	1.263440	14.13112
Median	0.690000	0.250000	0.000000	14.25000
Maximum	8.750000	2.200000	3.870000	27.47000
Minimum	-6.930000	0.003000	0.000000	4.940000
Std. Dev.	1.034528	0.329487	1.337919	4.168680
Observations	376	376	376	376

Sumber : olah data *evIEWS* 2010

Berdasar hasil dari analisis deskriptif diatas, dapat diketahui bahwa jumlah sampel data pada setiap variabel adalah 376, yang berasal dari sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI mulai tahun 2015 hingga 2019. Variabel *tax avoidance* dengan simbol ETR mempunyai nilai *mean* 0,290035 yang menunjukkan sektor perusahaan manufaktur rata-rata membayar pajak menggunakan 29% dari laba, dan nilai minimal ETR perusahaan manufaktur menunjukkan angka 0,003000 yang artinya perusahaan dalam sampel minimal membayarkan pajaknya sebesar 0,3%. Nilai maksimum ETR menunjukkan angka 2,2 artinya terdapat perusahaan yang membayar pajaknya 2 kali lipat lebih besar dari labanya, serta untuk rentang variasi variabel *tax avoidance* cukup bervariasi dilihat dari *Std.Dev.* sebesar 0,33 lebih besar dibandingkan dengan nilai *mean* sebesar 0,29.

Variabel tingkat koneksi politik dengan simbol POL yang dihitung dengan logaritma natural total skor tingkat koneksi politik, mempunyai nilai rata-rata 1,26. Sedangkan, untuk nilai minimum menunjukkan nilai 0 yang berarti terdapat perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik, serta nilai maksimum tingkat koneksi politik menunjukkan angka 3,87. Standar deviasi variabel POL

menunjukkan angka 1,34 yang berarti data cukup bervariasi dibandingkan dengan *mean* sebesar 1,26.

Variabel kontrol ukuran perusahaan menunjukkan nilai rata-rata sebesar 14,13. Nilai standar deviasinya menunjukkan angka 4,16 yang berarti data tidak bervariasi jika dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Nilai minimal ukuran perusahaan sebesar 4,94 dan nilai maksimumnya menunjukkan angka 27,47. Variabel kontrol yang kedua yaitu *leverage*, yang menunjukkan rata-rata sebesar 0,93 dengan standar deviasi 1,03 yang menunjukkan data cukup bervariasi dibanding dengan nilai rata-ratanya. Nilai minimum *leverage* sebesar -6,93 dan nilai maksimum sebesar 8,75.

Stasioneritas Data

Uji stasioneritas data dilakukan untuk mengetahui apakah data bersifat konstan dari waktu ke waktu. Uji stasioneritas yang digunakan adalah *Augmented Dickey-Fuller Test* (ADF) pada tingkat stasioneritas *level*, data dinyatakan stasioner jika nilai *probability* yang dihasilkan tidak melebihi signifikansi sebesar 0,05 sedangkan jika hasil *probability* melebihi 0,05 maka data dinyatakan tidak stasioner dan harus melakukan uji stasioneritas tingkat berikutnya. Berikut adalah rangkuman hasil uji stasioneritas variabel pada penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Stasioneritas (*Unit Root Test*)-ADF

Hasil <i>Augmented Dickey-Fuller Test</i> (ADF)			
No	Variabel	Tingkat Stasioneritas Level	
		Probability	Keterangan
1	<i>Tax Avoidance</i>	0,0000	Stasioner
2	Koneksi Politik	0,0000	Stasioner
3	Ukuran Perusahaan	0,0000	Stasioner
4	<i>Leverage</i>	0,0000	Stasioner

Sumber : olah data *eviews* 2010

Estimasi Model Regresi Data Panel

Estimasi model regresi data panel digunakan untuk menentukan model yang tepat antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Penentuan model yang tepat akan melakukan tiga uji, yang pertama adalah uji *chow test*, uji ini untuk menentukan model yang tepat antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Setelah mendapat hasil

dari uji yang pertama dilanjutkan dengan uji yang kedua yaitu uji *hausmen*, yaitu uji untuk memilih antara model *Fixed ffect Model* dan *Random Effect Model*. Pengujian model yang terakhir adalah *langrange multiplier* untuk menentukan model yang tepat antara *Common Effect Model* dan *Random Effect Model*. Berikut adalah hasil pengujian estimasi model regresi data panel.

Tabel 5. Hasil Uji Estimasi Model Regresi Panel

Uji Estimasi Model Regresi Panel			
Uji	Acuan	Nilai	Hasil
<i>Chow</i>	<i>Cross-section Chi Square</i>	0,0000	<i>Fixed Effect Model</i>
<i>Hausmen</i>	<i>Cross-section random</i>	0,0970	<i>Random Effect Model</i>
<i>Langrange</i>	<i>Breusch-Pagan</i>	0,0000	<i>Random Effect Model</i>
Kesimpulan		<i>Random Effect Model</i>	

Sumber : olah data *eviews* 2010

Pada pengujian yang pertama, yaitu Uji *Chow*, jika H_0 yang terpilih adalah *common effect model* sedangkan

jika H_1 yang terpilih adalah *fixed effect model*. Hal ini ditentukan dari nilai *cross-section Chi square*, dibandingkan

dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Pada pengujian yang pertama, diperoleh nilai *cross-section Chi square* sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih rendah dari 0,05 sehingga H_1 diterima, yang terpilih pada uji *chow* yaitu *fixed effect model*.

Pengujian berikutnya adalah Uji *Hausmen*. Uji ini digunakan untuk memilih antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Jika H_0 yang terpilih adalah *Random Effect Model*, sedangkan jika H_1 yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*. Hal ini ditentukan dengan melihat nilai *Cross-section random* dibandingkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Nilai *Cross-section random* diperoleh 0,0970 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima, yaitu yang terpilih pada uji ini adalah *Random Effect Model*.

Pengujian yang terakhir yaitu Uji *Langrange Multiplier*. Uji ini digunakan untuk memilih model yang tepat antara *Random Effect*

Model dan *Common Effect Model*. Apabila H_0 diterima, yang terpilih adalah *Common Effect Model*, sedangkan jika H_1 diterima yang terpilih adalah *Random Effect Model*. Hal ini bisa dilihat dengan membandingkan nilai *Breusch-Pagan* dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Nilai *Breusch-Pagan* menunjukkan angka 0,0000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_1 diterima, yang terpilih adalah *Random Effect Model*.

Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan Uji *Chow*, Uji *Hausmen*, dan Uji *Langrange Multiplier*, hasil menunjukkan *Random Effect Model* adalah model terbaik untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Berikut adalah *output* dari *Random Effect Model*.

Tabel 6. Output *Random Effect Model*

<i>Random Effect Model</i> (Variabel POL diukur dengan skor tingkat koneksi politik)			
Variabel	Koefisien	Prob.	Keterangan
C	0.427787	0.0000	
Koneksi Politik	-0.029023	0.0308	<u>H_a diterima,</u> <u>H_0 ditolak</u>
Ukuran Perusahaan	0.022197	0.1565	
<i>Leverage</i>	-0.008343	0.0529	

Sumber : olah data *evIEWS* 2010

Hasil *output Random Effect Model* menunjukkan bahwa nilai *probability* koneksi politik dengan *tax avoidance* sebesar 0,0308 lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa H_a diterima, yaitu variabel koneksi politik yang dihitung sesuai tingkat koneksinya, terbukti memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada hasil *output Random Effect Model* juga menunjukkan bahwa nilai koefisien koneksi politik terhadap *tax avoidance* sebesar -0,029023. Koefisien negatif menunjukkan hubungan fungsional variabel *independent* berbanding terbalik dengan koefisien variabel *dependent*. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan variabel tingkat koneksi politik, menyebabkan peningkatan penghindaran pajak yang ditunjukkan dengan turunnya nilai pembayaran pajak yaitu variabel ETR.

Tabel 7. Output Random Effect Model

<i>Random Effect Model (Variabel POL diukur sebagai variabel dummy)</i>			
Variabel	Koefisien	Prob.	Keterangan
C	0.350820	0.0002	
Koneksi Politik	-0.057602	0.2362	<u>Ho diterima,</u> <u>Ha ditolak</u>
Ukuran Perusahaan	0.030647	0.1100	
Leverage	-0.004205	0.4782	

Sumber : olah data *eviews* 2010

Pengujian Tambahan

Pengujian tambahan yang dilakukan untuk mengetahui efek dari pengukuran koneksi politik dengan mempertimbangkan tingkat konektivitasnya dibanding dengan pengukuran *dummy*. Pengujian dilakukan dengan cara merubah perhitungan koneksi politik yang dihitung dengan tingkat konektivitasnya diganti dengan pengukuran koneksi politik yang dihitung menggunakan variabel *dummy* yaitu skor 1 untuk perusahaan yang terdapat koneksi politik, dan 0 untuk perusahaan yang tidak terdapat koneksi politik. Berikut hasil pengujian uji panel dengan *Random Effect Model*, jika koneksi politik dihitung menggunakan variabel *dummy*.

Pengujian koneksi politik terhadap *tax avoidance* yang dihitung menggunakan variabel *dummy*, hasil menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax*

avoidance yang dibuktikan dengan angka *probability* koneksi politik lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik yang dihitung menggunakan skor tingkat

konektivitasnya dengan koneksi politik yang diukur menggunakan variabel *dummy* menunjukkan hasil yang berbeda.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Koneksi Politik Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan jika hipotesis pertama (H_a) diterima yaitu tingkat koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* jika diukur dengan skor tingkat koneksi politik, dibuktikan dengan nilai *probability* dari hasil uji data menunjukkan nilai kurang dari 0,05. Hipotesis kedua (H_o) juga dinyatakan diterima yaitu koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* diukur dengan variabel *dummy*, dibuktikan dengan nilai *probability* dari uji data menunjukkan hasil lebih dari 0,05. Berdasar hasil uji tersebut, terdapat perbedaan hasil penelitian dikarenakan terdapat perbedaan cara mengukur variabel koneksi politik.

Hasil hipotesis pertama didukung dengan penelitian Kim & Zhang (2016) yang menemukan hubungan berbanding lurus antara penghindaran pajak dengan koneksi politik. Di Indonesia, Sudibyo & Jianfu (2016) juga mendapatkan hasil penelitian yang sama menggunakan proksi *long run Cash ETR*. Secara umum, perusahaan yang memiliki hubungan koneksi politik dapat membayar pajak lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang tidak memiliki

koneksi politik. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ferdiawan & Firmansyah (2017) yang menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sesuai dengan teori hubungan politik, hasil penelitian terjadi karena perusahaan menganggap membayar pajak merupakan suatu halangan untuk kepentingan perusahaan, sehingga perusahaan menggunakan koneksi politik untuk mempengaruhi pembayaran pajak. Koneksi politik yang ada sangat beragam, dilihat dari sampel penelitian, koneksi politik yang dibuat oleh dewan komisaris dan dewan direktur yaitu dengan jabatan di pemerintahan, menjadi tokoh partai politik, hingga menjadi tokoh TNI POLRI Negara Republik Indonesia. Menjadi bagian dari politik tidak melanggar peraturan pasar modal, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 21/POJK/2015 tidak menyebutkan larangan untuk dewan direksi dan dewan komisaris mempunyai dualisme jabatan di partai politik. Hanya saja, sebagian perusahaan masuk bursa memberikan aturan kode etik internal perusahaan perihal larangan memiliki koneksi politik untuk individu selain pemegang saham. Perekrutan dewan komisaris yang mempunyai pengaruh politik, baik masih aktif maupun sudah tidak aktif juga tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, hal ini mendukung hasil penelitian bahwa koneksi politik mempengaruhi perusahaan dalam membayarkan

kewajiban pajaknya. Selain itu, pergantian komisaris setiap tahun melalui RUPS dapat menyebabkan perusahaan leluasa merekrut individu yang memiliki koneksi politik (Ferdiawan & Firmansyah, 2017).

Penelitian Faccio (2006) di Negara Indonesia memberikan penjelasan mengenai manfaat yang didapat perusahaan jika salah satu individu di perusahaan memiliki koneksi politik. Pada bidang perpajakan, dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu membayar pajak lebih rendah. Hal ini diduga karena terdapat kondisi bahwa perusahaan yang dimiliki pemerintah, termasuk Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah sesuai dengan PMK nomor PMK-71/PMK.03/2010. Upaya *lobbying* yang bersifat menekan otoritas pajak juga dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Usaha melobi dapat berfungsi untuk melakukan penghindaran pajak dengan akses legislasi yang lebih baik serta tekanan transparansi pasar modal yang lebih rendah, atau mengurangi resiko hukuman saat penghindaran pajak terungkap (Kim & Zhang, 2016). Minimnya pengungkapan koneksi politik suatu perusahaan dapat menyebabkan masalah *agency theory*. Manajemen dapat dengan sengaja melakukan penghindaran pajak untuk mencapai target perusahaan dengan menurunkan beban pajak tanpa diketahui pemegang saham, yang sebenarnya tidak diharapkan karena

beresiko tinggi jika hal itu diketahui publik. Masalah keagenan ini juga mendukung hasil penelitian yang memberikan kesimpulan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil hipotesis kedua didukung oleh penelitian Hijriani *et al.* (2017) yang menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena perusahaan yang dijadikan sampel penelitian merupakan perusahaan BUMN yang lebih diamati oleh pemerintah. Hal ini didukung oleh penelitian Sugiyarti (2017) yang mendapatkan hasil kesimpulan bahwa semakin kuat hubungan politik, semakin rendah perusahaan melakukan *tax avoidance*. Perusahaan milik negara sebagai *principal* dianggap sebagai perusahaan yang patuh dalam membayar pajak. Perusahaan milik negara menunjukkan kepatuhannya dalam membayar pajak, sebagai sikap yang diteladankan kepada *agent* untuk menjaga nama baik pemerintah dan dapat menjadi contoh untuk publik sebagai wajib pajak yang patuh atas kewajiban perpajakannya. Penelitian Pranoto *et al.* (2015), Butje & Tjondro (2014), dan Mulyani *et al.* (2014) juga menyatakan bahwa koneksi politik mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian ini kemungkinan terjadi karena sempitnya definisi koneksi politik yang digunakan seperti pada Mulyani *et al.* (2014) hanya

menggunakan aspek kepemilikan pemerintah sebagai proksi koneksi politik, Pranoto *et al.* (2015) hanya menggunakan koneksi politik pada dewan komisaris saja, serta periode sampel penelitian Mulyani *et al.* (2014) yang kurang relevan juga dapat mempengaruhi hasil penelitian (Ferdiawan & Firmansyah, 2017).

Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol. Variabel pertama adalah ukuran perusahaan (*size*), pada hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *probability* lebih dari 0,05 yang berarti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Variabel kedua yaitu *leverage*, yang mendapatkan hasil penelitian dengan angka *probability* lebih dari 0,05 hal ini juga menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Hasil hipotesis pertama pada penelitian ini mendapatkan hasil kesimpulan yaitu tingkat koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini memiliki arti semakin tinggi tingkat koneksi politik, maka perusahaan akan semakin tinggi pula melakukan *tax avoidance*. Perusahaan seringkali melakukan *tax avoidance* karena pajak dianggap sebagai penghalang kepentingan perusahaan. Hasil penelitian ini membuktikan jika perusahaan memiliki koneksi politik maka perusahaan tersebut dapat membayar pajak lebih rendah. Hal

ini didukung dengan tidak adanya larangan dewan direksi dan dewan komisaris yang menjabat memiliki rangkap jabatan di bidang politik. PMK nomor PMK-71/PMK.03/2010 juga menyebutkan bahwa perusahaan yang dimiliki pemerintah termasuk Pengusaha Kena Pajak yang beresiko rendah, serta adanya *lobbying* dengan otoritas pajak dapat mendukung terjadinya *tax avoidance* karena adanya koneksi politik. Hipotesis kedua mendapat hasil kesimpulan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini dapat terjadi karena sempitnya definisi koneksi politik.

Penelitian ini mengembangkan pengukuran koneksi politik dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu menggunakan variabel *dummy*, sedangkan pada penelitian ini memperhatikan tingkat konektivitasnya, dan dibuktikan pada hasil penelitian ini bahwa kedua cara pengukuran menunjukkan hasil yang berbeda. Keterbatasan penelitian yang ada pada penelitian ini adalah, sampel yang digunakan hanya pada satu sektor pada satu negara. Saran untuk penelitian selanjutnya, koneksi politik dapat diukur dengan pendekatan hasil penelitian di negara yang budaya dan tingkat ekonominya hampir sama, misalnya negara berkembang di Benua Asia, sehingga hasil yang didapatkan lebih representatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Amri, M. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 9(1), 1–14.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(2), 1–9.
- Darmawan, I., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Roa, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143–161.
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14, 1584–1613.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1.
<https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.96>
- Faccio, M. (2006). Politically connected firms. *American Economic Review*, 96(1), 369–386.
<https://doi.org/10.1257/000282806776157704>
- Faradiza, S. A. (2019). Dampak Strategi Bisnis terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 107–116.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Pendapatan Perpajakan merupakan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1601–1624.
- Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017). Political Connections and Related Party Transactions: Evidence from Indonesia. *International Journal of Accounting*, 52(1), 45–63.
<https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.01.004>
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran

- Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26.
<https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Pengaruh moderasi koneksi politik terhadap kepemilikan keluarga dan agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 22(1).
- Hijriani, A. N., Latifah, S. W., & Setyawan, S. (2017). Pengaruh Koneksi Politik, Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 525–534.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v4i1.4924>
- Khelif, H., & Amara, I. (2019). Political connections, corruption and tax evasion: a cross-country investigation. *Journal of Financial Crime*, 26(2), 401–411.
<https://doi.org/10.1108/JFC-01-2018-0004>
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). *Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness*. 33(1), 78–114.
<https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 40–52.
- Maulana, A., & Wati, L. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Struktur Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–12.
- Mulyani, S., Darminto, & Endang, N. P. M. G. W. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik, dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 20018-2012). *PS Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*, 66, 37–39.
- Nurfadilah, Mulyati, H., Purnamasari, M., & Niar, H. (2015). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015). *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper, 2010*, 441–449.
- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh Size, Age,

- Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 10. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.171>
- Pranoto, B. A., Negeri, U., Maret, S., Negeri, U., & Maret, S. (2015). *Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness*. 2012, 472–486.
- Prayogo, K. H. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4(2), 156–167.
- Sari, K., & Somoprawiro, R. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 90–103.
- Sari, N., Kalbuana, N., & Jumadi, A. (2016). Pengaruh konservatisme akuntansi, kualitas audit, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan perdagangan eceran yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2011-2015). *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 3, 431–440. <https://doi.org/2460-0784>
- Sudibyo, Y. A., & Jianfu, S. (2016). Political connections, state owned enterprises and tax avoidance: An evidence from Indonesia. *Corporate Ownership and Control*, 13(3continued2), 279–283. <https://doi.org/10.22495/coc.v13i3c2p2>
- Sugianto, D. (2019, July). *Mengenal soal Penghindaran Pajak yang Dituduhkan ke Adaro*.
- Sugiyarti, S. M. P. L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–2016). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1625–1642. <https://doi.org/10.17509/jra.k.v5i3.9225>
- Supatmi, Sutrisno, T., Saraswati, E., & Purnomosidhi, B. (2019). The effect of related party transactions on firm performance: The moderating role of political connection in indonesian banking. *Business: Theory and Practice*, 20(2003), 81–92. <https://doi.org/10.3846/BTP.2019.08>
- Tao, Q., Sun, Y., Zhu, Y., & Yang, X. (2017). Political Connections and Government Subsidies: Evidence from Financially Distressed Firms in China.

Emerging Markets Finance and Trade, 53(8), 1854–1868.
<https://doi.org/10.1080/1540496X.2017.1332592>

Wahab Abdul, E. A., Mohamad Ariff, A., Marzuki, M. M., & Mohd Sanusi, Z. (2015). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. In *Emeraldinsight Asian Review of Accounting* (Vol. 23, Issue 3).
<https://doi.org/10.1108/AR-A-04-2012-0017>

Winarno, W. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* (4th ed.). Yogyakarta: UU STIM YKPN.